



**RENCANA KERJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN SAMPANG**  
**TAHUN TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**2021**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang menyusun Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2023.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung”**, dan penjabaran dari tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien, Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Meningkatkan peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif”**.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

- Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);



35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, meliputi:

## **BABI PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan
- 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kejadiannya.

## **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2020 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisis pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang pada tahun 2020.
- b. Evaluasi Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 memuat 15 program dan 45 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renja Tahun 2020 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sampai dengan tahun 2021. Adapun Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana terlampir pada tabel T-C.29 di bawah ini

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2021**

Kode Rekening	Urusan/Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4*100
4.05.	URUSAN PEMERINTAHAN										
4.05.4.05.0 3.16.	Program Fasilitas Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	Persentase fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100		100	100	100			25
4.05.4.05.0 3.16.01.	Fasilitas Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	1	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim Otoda	120rakor		24 rakor	24 rakor	100			25
		2	Jumlah dokumen kesepakatan bersama dan dokumen perjanjian kerjasama	120 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama		24 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama	24 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama	100			25
4.05.4.05.0 3.16.02.	Fasilitas Percepatan Pembakuan Rupa	1	Jumlah dokumen rupabumi/toponimi	5dokumen dan 5 peta -		1 dokumen dan 1	1 dokumen dan 1	100			25

	Bumi dan Batas Wilayah					peta -	peta -				
		2	Jumlah tapal batas wilayah yang di administrasikan	350 patok batas desa		70 patok batas desa	70 patok batas desa	100			25
4.05.4.05.0 3.16.03.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1	Jumah dokumen penyusunan LPPD dan ILPPD yang disusun	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100			25
4.05.4.05.0 3.16.04.	Fasilitasi Layanan Pemerintahan	1	Jumlah dialog/audiensi yang dilaksanakan	70 kali		14 kali	14 kali	100			25
		2	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan	60 kunjungan		12 kunjungan	12 kunjungan	100			25
		3	Jumlah rakor yang dilaksanakan	100 rakor		20 rakor	20 rakor	100			25
		4	Jumlah rakor unsur FORKOPIMDA yang dilaksanakan	120 kali		24 kali	24 kali	100			25
4.05.4.05.0 3.16.05.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Daerah	1	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi terpadu satu pintu	70 kecamatan		14 kecamatan	14 kecamatan	100			25
		2	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi	70 kecamatan		14 kecamatan	14 kecamatan	100			25
<b>4.05.4.05.0 3.17</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>1</b>	<b>Persentase Produk Hukum yang diundangkan</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			<b>25</b>

		2	<b>Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Perdata Pemerintah Daerah yang ditangani</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			25
4.05.4.05.0 3.17.01.	Penyusunan Produk Hukum	1	Jumlah Perda yang diundangkan	58 Perda		20 Perda	20 Perda	100			25
		2	Jumlah Perbup yang diundangkan	250 Perbup		100 Perbup	100 Perbup	100			25
		3	Jumlah Raperda	25 Raperda		10 Raperda	10 Raperda	100			25
		4	Jumlah Naskah Akademik	25 Naskah Akademik		10 Naskah Akademik	10 Naskah Akademik	100			25
4.05.4.05.0 3.17.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum	1	Jumlah Kasus Hukum yang ditangani	20 Kasus		8 Kasus	8 Kasus	100			25
		2	Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	1750 Org		700 Org	700 Org	100			25
		3	Jumlah Kadarkum yang dibina	1125 Org		450 Org	450 Org	100			25
4.05.4.05.0 3.17.03.	Fasilitasi dokumentasi dan keputusan Bupati	1	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan berupa Buku Buletin edisi Juni dan Desember dan Lembaran Daerah tahun berjalan	1800 Buku		720 Buku	720 Buku	100			25
		2	Jumlah Peserta Sosialisasi	1750 org		700 org	700 org	100			25
		3	Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan	2500 Kebup		1000 Kebup	1000 Kebup				25
<b>4.05.4.05.0 3.18.</b>	<b>Program Evaluasi</b>	<b>1</b>	<b>Persentase target kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan,</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>

	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		analisis dan formasi Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan								
4.01.4.01.0 3.18.01.	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1	Jumlah Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	84 Laporan	42	42	42	100			100
		2	Jumlah Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu	2 laporan	1	1	1	100			100
4.05.4.05.0 3.18.02.	Penyusunan Analisa Jabatan	1	Persentase Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100			100
		2	Persentase Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan	100	100	100	100	100			100
		3	Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS sesuai standar yang dibutuhkan SO dan Tupoksi PD	100	100	100	100	100	-	-	100
4.05.4.05.0 3.18.03.	Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintah	1	Jumlah Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas, Kode Wilayah dan Pakaian Dinas	1 perbup	1				-	-	100
4.05.4.05.0 3.19.04.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di	1	Jumlah Peraturan Bupati tentang RMRB Kabupaten Sampang	1 perbup	1	1	1	100	-	-	100

	Lingkungan Pemerintah Daerah										
		2	Persentase PD yang telah menyusun Rencana Aksi (Action Plan) Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	100	100	100	100	100			100
		3	Persentase PD yang telah dievaluasi Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100			100
		4	Persentase PD yang telah menerapkan budaya kinerja	40	40	40	40	100	-	-	100
<b>4.05.4.05.0 3.41.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>1</b>	<b>Persentase dokumen IKM Kabupaten Sampang yang disusun</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>
4.05.4.05.0 3.41.01.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	1	Persentase Laporan Standar Pelayanan Publik yang benar dan tepat waktu	100,00	100	100	100	100			100
		2	Persentase Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang terukur	100,00	100	100	100	100			100
		3	Jumlah PD yang di Monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik	128 unit kerja	64 unit kerja	64 unit kerja	64 unit kerja	100			100
<b>4.05.4.05.0 3.19.</b>	<b>Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Persentase fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
4.05.4.05.0 3.19.01.	Koordinasi dan Fasilitasi	1	Jumlah Dokumen Pedoman dan	5 dok		2 dok	2 dok	100			20



	Penyusunan Program Pembangunan Daerah		Dokumen SSHB yang disusun								
		2	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	50 kali		20 kali	20 kali	100			20
		3	Jumlah dokumen HSPK yang disusun	5 dok		2 dok	2 dok	100			20
4.05.4.05.0 3.19.02.	Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	1	Jumlah PD dan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	3755 peserta		1502 peserta	1502 peserta	100			20
4.05.4.05.0 3.19.03.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi yang disusun	5 dok		2 dok	2 dok	100			20
		2	Jumlah Pengguna LPSE yang difasilitasi	3750 pengguna		1500 pengguna	1500 pengguna	3600			20
		3	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	5 aplikasi		2 aplikasi	2 aplikasi	100			20
<b>4.05.4.05.0 3.26.</b>	<b>Program Fasilitas Unit Layanan Pengadaan</b>	<b>1</b>	<b>Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99</b>			<b>199</b>
4.05.4.05.0 3.20.01.	Pengelolaan administrasi pengadaan barang/jasa	1	Jumlah Dokumen Data Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	12		12	12	100			100
		2	Jumlah Dokumen Hasil Tender	300							36,33
4.05.4.05.0 3.20.02.	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	1	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan/Bi mtek/ Pendampingan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3		2	2	100			33,33

4.05.4.05.0 3.20.03.	Pelaksanaan dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang / Jasa	1	Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Secara e-Tendering	400		400	217	54		54,25
4.05.4.05.0 3.20.04.	Pengelolaan LPSE	1	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	2		2	2	100		200
<b>4.05.4.05.0 3.23</b>	<b>Program Koordinasi dan penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>1</b>	<b>Jumlah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
4.05.4.05.0 3.23.01	Koordinasi bidang pendidikan, kebudayaan dan keagamaan	1	Jumlah Koordinasi Bidang Pendidikan kebudayaan dan keagamaan	165 kali		33 kali	32 kali	96,9		20
4.05.4.05.0 3.23.02	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	1	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	55 keg		11 keg	11 keg	100		20
4.05.4.05.0 3.23.03.	Koordinasi bidang tenaga kerja dan kependudukan	1	jumlah koordinasi bidang tenaga kerja dan kependudukan	105 kali		21 kali	19 kali	90,5		20
4.05.4.05.0 3.23.03	Koordinasi bidang sosial, keagamaan dan kesehatan	1	Jumlah koordinasi sosial, keagamaan dan kesehatan	165 kali		33 kali	32 kali	96,9		20
<b>4.05.</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG LAINNYA</b>									
<b>4.05.03.22</b>	<b>Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan</b>	<b>1</b>								

4.05.03.22.01	Fasilitasi Acara dan Dokumentasi	1	Jumlah Acara dan Dokumentasi	500	100						
4.05.03.22.02	Fasilitasi Pemberitaan dan Penyebarluasan Informasi	2	Jumlah pertemuan dengan wartawan	500	100						
4.05.03.22.03	Fasilitasi kehumasan dan keprotokolan	3	Jumlah kegiatan kehumasan dan keprotokolan	500	100						
4.05	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA	1									
4.05.03.42.	Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	Persentase fasilitasi keprotokoleran dan komunikasi pimpinan			100	100	100			
4.05.03.42.01	Fasilitasi Keprotokoleran	1	Jumlah Keprotokoleran acara pimpinan			300 kegiatan	300 kegiatan	100			
4.05.03.42.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi			12 kunjungan	12 kunjungan	100			
4.05.	NON URUSAN										
4.05.4.05.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi	100							20
4.01.4.01.03.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun dan	50 000		20 000	20 000	100			20
4.01.4.01.03.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah rekening pemakaian jasa komunikasi (telepon, air, 43 Rekening listrik dan tv kabel	215		86	86	100			20
4.01.4.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah1	1	Jumlah Jaminan atas Barang Milik Daerah	15		6	6	100			

4.01.4.01.0 3.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Jumlah Pemeliharaan Surat-Surat Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40		142	142	100		20
4.01.4.01.0 3.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Kantor	50		182	182	100		20
4.01.4.01.0 3.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	392		152	152	100		20
4.01.4.01.0 3.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah surat-surat/blanko/formulir yang di perbanyak (cetak dan fotocopy/penggandaan)	200		48	48	100		20
4.01.4.01.0 3.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	225		90	90	100		20
4.01.4.01.0 3.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Memadai dan Layak Pakai	55		22	22	100		20
4.01.4.01.0 3.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	15		6	6	100		20

4.01.4.01.0 3.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah bahan bacaan koran dan majalah untuk Kantor Bupati Sampang dan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	7860		3148	3148	100			20
4.01.4.01.0 3.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Jumlah bahan logistik dan juru masak berikut pramusaji untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang	60		24	24	100			20
4.01.4.01.0 3.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat, tamu di Kantor Bupati Sampang dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	110		44	44	100			20
4.01.4.01.0 3.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1	Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti untuk menyamakan persepsi antar daerah	7365		2946	2946	100			20
4.01.4.01.0 3.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah	40		16	16	100			20
4.01.4.01.0 3.01.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1	Jumlah koordinasi dengan SKPD di kabupaten sampang	1495		598	598	100			20

<b>4.05.4.05.0 3.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>20</b>
4.01.4.01.0 3.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas/operasional (sepeda motor dinas)	5		2	2	100			20
4.01.4.01.0 3.02.05	Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1	Jumlah perlengkapan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang	30		12	12	100			20
4.01.4.01.0 3.02.10	Pengadaan Meubeulair	1	Jumlah kebutuhan meubelair yang layak pakai untuk prasarana kantor	65 dan 5		46 dan 2	46 dan 2	100			20
4.01.4.01.0 3.02.11	Pengadaan Komputer	1	Jumlah peralatan komputer sebagai penunjang pekerjaan	25		10	10	100			20
4.01.4.01.0 3.02.12	Pengadaan Peralatan Kantor	1	Jumlah Peralatan kantor untuk produktifitas kerja PNS	25 dan 5		10 dan 2	10 dan 2	100			20
4.01.4.01.0 3.02.16	Pengadaan alat-alat Komunikasi	1	Jumlah alat-alat komunikasi	50		20	20	100			20
4.01.4.01.0 3.02.19	Pengadaan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah perlengkapan kantor untuk produktifitas kerja PNS	60		24	24	100			20
4.01.4.01.0 3.02.20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	1	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan untuk Bupati, Wakil Bupati dan	18		6	6	100			20

			Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang							
4.01.4.01.0 3.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	5		2	2	100		20
4.01.4.01.0 3.02.23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	1	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan yang layak pakai	50		20	20	100		20
4.01.4.01.0 3.02.24	Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak	100		40	40	100		20
4.01.4.01.0 3.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	1	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Meubelair	400		160	160	100		20
4.01.4.01.0 3.02.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan/ perlengkapan kantor dalam kondisi layak pakai	1290		516	516	100		20
4.01.4.01.0 3.02.34	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	1	Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas	10		4	4	100		20
<b>4.05.4.05.0 3.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase aparatur yang berpakaian dinas sesuai</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>20</b>

4.01.4.01.0 3.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1	jumlah pembuatan pakaian dinas KDH/ WKDH untuk bupati, PDH untuk sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati	60		24	24	100			20
4.01.4.01.0 3.03.02	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	1	Jumlah pakaian kerja lapangan untuk petugas kebersihan rumah dinas	125		50	50	100			20
<b>4.05.4.05.0 3.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>20</b>
4.01.4.01.0 3.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	Jumlah PNS yang wajib meningkatkan keterampilan teknis di lingkungan sekretariat daerah kabupaten sampang	30 dari 725		12 dari 290	12 dari 290	100			20
<b>4.05.4.05.0 3.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>20</b>
4.01.4.01.0 3.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1	Jumlah Laporan Semesteran Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	5		2	2	100			20



4.01.4.01.0 3.06.04			Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD	5		2	2	100			20
4.01.4.01.0 3.06.05			Jumlah Laporan RKA dan DPA SKPD tahun berikutnya	10		2	2	100			20
		<b>1.</b>	<b>Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif</b>	<b>0,76</b>		<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>100</b>			<b>100</b>
<b>4.05.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
4.05.4.05.0 3.19.06.	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/ IKM	1	Jumlah SKM PD yang di susun	42		42	42	100			100
<b>4.05.4.05.0 3.21.</b>	<b>Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>125</b>	<b>35</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>78,57</b>			<b>30</b>
		<b>2</b>	<b>Kontribusi BUMD terhadap PAD (%)</b>	<b>28,47%</b>	<b>3,69</b>	<b>12,05%</b>	<b>3,62%</b>	<b>30,04</b>			<b>30</b>
4.01.4.01.0 3.21.01.	Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Sumber Daya Alam	1	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan TSP	355	50	50	60	120			30
		2	Jumlah pelaksanaan jasmas di kecamatan	5	5	0	0	0			100
		3	Jumlah survey lokasi yang dilakukan	5	5	0	0	0			100
		4	Koordinasi dengan SKPD terkait mengenai pengelolaan SDA	107	0	12	12	100			90

4.01.4.01.0 3.21.02.	Koordinasi Pelayanan Sarana Perekonomian	1	Jumlah koordinasi dengan OPD terkait mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif dan pengembangan UMKM, pameran, agribisnis dan pariwisata	225	32	36	36	100			30
		2	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif	35	20	0	0	0			
		3	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif, agribisnis dan pariwisata	148	0	24	24	100			
4.01.4.01.0 3.21.03.	Koordinasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1	Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD	217	35	33	33	100			30
		2	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan BUMD	504	117	80	95	118,75			30
		3	Audit Apotek Trunojoyo Sampang	1	0	1	1	100			100
4.05.4.05.0 3.24.	<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	1	<b>Persentase peserta sosialisasi yang memahami ketentuan di bidang cukai</b>	100		100	100	100			100
4.01.4.01.0 3.24.01.	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai	2024	524	300	300	100			30

	undangan kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelayanan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai										
4.01.4.01.0 3.24.02.	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai	1400	0	1400	1400	100			100
4.01.4.01.0 3.24.03.	pemantauan dan evaluasi atas pelayanan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai		Jumlah OPD pengelola dana DBHCHT	7	0	6	7	117			100
<b>4.05.4.05.0 3.25.</b>	<b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>	1	<b>Persentase jumlah merk rokok ilegal yang dilaporkan ke bea cukai</b>	100	100	0	0	0			100

4.01.4.01.0 3.25.01.	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran/tempat penjual eceran	1	Monitoring peredaran rokok ilegal	42	42	0	0	0			100
		2	Pembuatan dokumen/laporan cukai rokok ilegal	1	1	0	0	0			100
<b>4.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg difasilitasi</b>	<b>100,00</b>					33	33	33
<b>4.01.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Persentase laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu</b>	<b>100,00</b>							
4.01.01.2.0 1.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah dokumen renstra/renja yang tersusun	6 dok					2 dok	2 dok	33
4.01.01.2.0 1.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang tersusun	3 dok					2 dok	2 dok	33
4.01.01.2.0 1.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	3 dok					2 dok	2 dok	33

4.01.01.2.0 1.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang tersusun	3 dok				2 dok	2 dok	33
4.01.01.2.0 1.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	3 dok				2 dok	2 dok	33
4.01.01.2.0 1.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ dan SAKIP yang tersusun	9 dok				3 dok	3 dok	33
<b>4.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg difasilitasi</b>	<b>100,00</b>						
<b>4.01.01.2.1 3.</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pelayanan penataan organisasi yang terlayani</b>	<b>100,00</b>						<b>16</b>
4.01.01.2.1 3.01.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	Jumlah OPD yang menyusun Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan	156 OPD						
		2	Jumlah OPD yang menyusun Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan	156 OPD						
		3	Jumlah OPD yang Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	156 OPD				39 OPD	39 OPD	25
4.01.01.2.1 3.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Jumlah OPD yang mengikuti pameran Pelayanan Publik	1 unit kerja/OPD						
		2	Jumlah Buku Perbup Kode Wilayah	60 buku				60 buku	60 buku	100

		3	Jumlah Buku Perbup Pakaian Dinas	60 buku						
		4	Jumlah pembuatan ID Card/Keplek	1200 Buah						
4.01.01.2.1 3.03.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Jumlah OPD yang menyusun dokumen Reformasi Birokrasi	156 OPD				39 OPD	39 OPD	25
		2	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	13 OPD/unit kerja				2 OPD/unit kerja	2 OPD/unit kerja	15
4.01.01.2.1 3.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Jumlah OPD dan unit kerja yang dilakukan Monev Pelayanan Publik	39 x4 =156 OPD dan 22 x 4=8 puskesmas dan 2 x 4=8 RSD						
		2	Jumlah OPD yang menyusun IKM	39 OPD						
4.01.01.2.1 3.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten Sampang yang tepat waktu	4 LKjIP				1 LKjIP	1 LKjIP	25
		2	Jumlah Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu	39x4=156 LKjIP				39 LKjIP	39 LKjIP	25
<b>4.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg difasilitasi</b>	<b>100,00</b>						
4.01.01.2.1 4.01	Fasilitasi Keprotokoleran	1	Persentase fasilitasi keprotokoleran dan komunikasi	100,00				66	66	66.67

			<b>pimpinan yg terlayani</b>							
4.01.01.2.1 4.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi	100				8 kunjungan	8 kunjungan	66.67
4.01.01.2.1 4.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3	Jumlah acara dan dokumentasi	100				35 kegiatan	35 kegiatan	17.50
<b>4.0101.02</b>	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan yang terlayani</b>	<b>100</b>						
<b>4.01.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan yang terlayani</b>	<b>100</b>						
4.01.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	1	Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Disusun LPPD, ILPPD, LKPJ dan SPM	'4 Dokumen				0		
		2	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pembinaan Administrasi	'14 Kecamatan				0		
		3	Jumlah Rapat Koordinasi FORKKOPIMDA yang dilaksanakan	24 kali				5		
		4	Jumlah Rapat Koordinasi OPD Yang Dilaksanakan	6 kali				4		
4.01.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Jumlah Batas Desa Yang Di Administrasikan	48 patok				100	223	
4.01.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	Jumlah PAW yang dilaksanakan	3 kali				0		

		2	Jumlah Rapat Koordinasi Tim Otda	6 kali					1		
<b>4.01.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	1	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100							
4.01.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Daerah	24 kali							
<b>4.01.01.02.2</b>	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	1	Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	100					25	25	25
4.01.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1	Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	100					25	25	25
4.01.01.02.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	Jumlah Koordinasi Bid. Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan	33 kali					12	12	35
		2	Jumlah Peringatan hari Besar keagamaan yang dilaksanakan	13 keg					5 kali	5 kali	38
4.01.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	33 kali					2 kali	2 kali	5
		2	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	5 keg					-	-	0
4.01.01.02.2.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja	1	Jumlah Koordinasi Bid. Tenaga Kesrja dan Kependudukan yang dilaksanakan	21 kali					5 kali	5 kali	23,80



	terkait Kesejahteraan Masyarakat										
4.01.01.02	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	1	<b>Cakupan pelayanan Fasilitas dan Koordinasi produk Hukum yang diundangkan</b>	100%							
		2	<b>Cakupan pelayanan Fasilitas dan Koordinasi kasus hukum perdata pemerintah daerah yang ditangani</b>	100%				5	5		5
4.01.01.02. 2.03	Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	1	'Cakupan pelayanan Fasilitas dan Koordinasi produk Hukum yang diundangkan	100%							
		2	'Cakupan pelayanan Fasilitas dan Koordinasi kasus hukum perdata pemerintah daerah yang ditangani	100%				5	5		5
4.01.01.02. 2.03.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1	Jumlah Perda yang diundangkan	12 Perda				0	0		0
		2	Jumlah Perbup yang diundangkan	55 Perbup				30 Perbup	30 Perbup		54
		3	Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan	550 Kepbup				285 Kepbup	285 Kepbup		51
		4	Jumlah Raperda	5 Raperda				0	0		0
		5	Jumlah Naskah Akademik	5 Naskah Akademik				0	0		0

4.01.01.02. 2.03.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	1	Jumlah Kasus Hukum yang ditangani	4 Kasus					2 Kasus	2 Kasus	50
		2	Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	350 Orang					350 Orang	350 Orang	100
		3	Jumlah Kadarkum yang dibina	225 Orang					0	0	0
4.01.01.02. 2.03.3	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	1	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan berupa Buku Buletin edisi Juni dan Desember dan Lembaran Daerah tahun berjalan	360 Buku					120 Buku	120 Buku	33
		2	Jumlah Peserta Sosialisasi	350 Orang					0	0	0
<b>4.01.01.03</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>1</b>	<b>Jumlah Pelaku ekonomi kreatif</b>	<b>89</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2</b>	<b>Kontribusi BUMD terhadap PAD (%)</b>	<b>3,85%</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3</b>	<b>Jumlah Kebijakan SDA yang dipantau</b>	<b>4</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.01.01.03. 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>1</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemantauan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>4</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.01.01.03. 2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan BUMD dan BLUD	320					8	8	2,5
		2	Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD	4					0	0	0

4.01.01.03. 2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi mengenai Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta inflasi daerah	60					12	12	20
		2	Persentase penurunan peredaran rokok ilegal	100					0	0	0
		3	jumlah operasi pasar pemberantasan rokok cukai ilegal	100					0	0	0
4.01.01.03. 2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1	Jumlah koordinasi dengan perangkat daerah terkait mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pameran dan pariwisata	160					3	3	1,88
<b>4.01.01.03. 2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>1</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemantauan Kebijakan SDA</b>	<b>100</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.01.01.03. 2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1	Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	12					2	2	16,7
		2	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai (OPD)	44					0	0	0
		3	Pengumpulan informasi peredaran	112					0	0	0

			rokok kena cukai ilegal (kali)							
		4	Penyaluran BLT untuk Buruh Tani Tembakau (kecamatan)	12				0	0	0
		5	Pengumpulan informasi data buruh tani tembakau penerima BLT (kecamatan)	12				0	0	0
4.01.01.03. 2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan Lingkungan Hidup	20				3	3	15
4.01.01.03. 2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	40				2	2	5
		2	Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait pelaksanaan TSP K3S Migas	100				18	18	18
<b>4.01.01.03</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	1	<b>Persentase kegiatan pembangunan yang difasilitasi</b>	<b>100</b>						
<b>4.01.01.03. 2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	1	<b>Persentase kegiatan pembangunan yang difasilitasi</b>	<b>100</b>						
4.01.01.03.2 .02.01	Fasilitasi Penyusunan Program pembangunan	1	Jumlah Aplikasi Standart Satuan Harga (e-SSH) yang terbangun	3 Aplikasi				1 Aplikasi	1 Aplikasi	33

		2	Jumlah Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang tersusun	3 Dokumen							
		3	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	600 peserta							
4.01.01.03.2 .02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Jumlah Buku Pengendalian Program Pembangunan Daerah yang tersusun	3 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen		3
		2	Jumlah Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	30 rakor							
		3	Jumlah Laporan Pengendalian Program Pembanguna Daerah yang disusun	3 Dokumen							
		4	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan	600 Peserta							
4.01.01.03.2 .02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun	3 Laporan							
		2	Jumlah Peresmian Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan	3 Peresmian							
		3	Jumlah Sistem Informasi Pelaporan (TEPPRA) yang dikelola	3 Aplikasi							
<b>4.01.01.03.2 .03</b>	<b>Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan</b>	<b>1</b>	<b>Persentase paket pengadaan barang/jasa yang difasilitasi secara elektronik</b>	<b>100</b>				<b>10</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

4.01.01.03.2 .03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	<b>Persentase Paket Pengadaan barang/Jasa yang difasilitasi secara Elektronik</b>	<b>100</b>					<b>10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.01.01.03.2 .03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	Jumlah Dokumen Hasil Tender	<b>300 dok</b>					<b>79</b>	<b>188</b>	62,6
4.01.01.03.2 .03.02	Pengelolaan LPSE	1	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	2 aplikasi					2	4	200
4.01.01.03.2 .03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	Jumlah sosialisasi/pelatihan/pendampingan terkait Pengadaan Barang/Jasa	3 kali					2	5	166,6

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2019 dan 2020 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan perubahan pada SOTK Sekretariat Daerah yang baru.

Pada tahun anggaran 2020 anggaran Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang sebesar Rp. 34.062.038.047,25 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.929.806.062,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 22.132.231.985,25 dengan total realisasi sebesar Rp. 31.549.978.004,00 (92,6%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.329.544.581,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 20.220.433.423,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program dan 45 kegiatan.

Realisasi dan faktor penyebab program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

Anggaran Sekretariat Daerah pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1)	Bagian Umum	14.970.600.507,50	13.582.788.150,00	90,7
2)	Bagian Pemerintahan	656.786.975,00	661.894.700,00	97,9
3)	Bagian Hukum	675.745.000,00	654.326504,00	99,6
4)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.469.245.455,00	2.059.183.000,00	83,4
5)	Bagian Perekonomian dan SDA	449.766.987,75	423.034.235,00	94,1
6)	Bagian Administrasi Pembangunan	523.975.785,00	512.275.882,00	97,8
7)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	930.564.520,00	919.320.000,00	98,8
8)	Bagian Organisasi	743.017.755,00	705.895.286,00	95,0
9)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	712.529.000,00	701.715.666,00	98,5

#### A. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Anggaran Belanja SKPD Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang ditargetkan sebesar Rp. 34.062.038.047,25 dan terealisasi sebesar Rp.31.549.978.004,00 atau sebesar 92,63% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasional terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 29.645.783.707,25 dan terealisasi Rp. 27.246.999.194,00 atau sebesar 91,91%;
- b. Belanja Modal yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan irigasi dan jaringan, dan Aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp. 4.416.254.340,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.302.978.810,00 atau sebesar 97,44 %;
- c. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi secara maksimal, sebagai berikut :
  - c.a. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran dianggarkan sebesar Rp.3.795.018.215,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.685.036.480,00 atau sebesar 97% dengan rincian sebagai berikut :
    1. Belanja kawat/faksimili/internet dianggarkan sebesar Rp.21.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.589.799,00 atau sebesar 63%.
    2. Belanja paket/pengiriman dianggarkan sebesar Rp.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 148.000,00 atau sebesar 28%.
    3. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dianggarkan sebesar Rp.12.225.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.765.000,00 atau sebesar 64%.
    4. Belanja perjalanan dinas luar daerah dianggarkan sebesar Rp.2.275.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.

Hal ini dikarenakan Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan;
  - c.b. Kegiatan Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran terealisasi sebesar Rp. 1.491.040.595,00 atau sebesar 98% dari anggaran sebesar Rp.1.460.419.325,00. Realisasi tersebut karena pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan;
  - c.c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah sebesar Rp. 1.139.660.000,00 atau sebesar 72% dari anggaran sebesar Rp.822.649.588,00 pada Belanja perjalanan dinas luar daerah dianggarkan sebesar Rp.813.715.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 513.305.402,00 atau sebesar 63%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat kondisional dan disesuaikan dengan kebutuhan;



c.d. Kegiatan Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor terealisasi sebesar Rp. 348.039.330,00 atau sebesar 79% dari anggaran sebesar Rp.273.390.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja cetak dianggarkan sebesar Rp. 262.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 61.200,00 atau sebesar 23%.
2. Belanja penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 1.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 244.800,00 atau sebesar 20%.
3. Belanja Upah Pekerja dianggarkan sebesar Rp.149.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 77.080.000,00 atau sebesar 52%.

Hal tersebut dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan;

c.e. Kegiatan Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan terealisasi sebesar Rp. 402.668.742,50 atau sebesar 89% dari anggaran sebesar Rp.358.190.899,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 499.950,00 dan terealisasi sebesar Rp. 306.000,00 atau sebesar 61%.
2. Belanja Upah Pekerja dianggarkan sebesar Rp.154.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 116.730.000,00 atau sebesar 75%.

Hal tersebut dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan;

c.f. Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dianggarkan sebesar Rp.4.852.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.686.021.798,00 atau sebesar 97% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dianggarkan sebesar Rp.19.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.071.500,00 atau sebesar 11%.
2. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas dianggarkan sebesar Rp. 149.470.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 110.146.533,00 atau sebesar 74%.
3. Belanja perjalanan dinas luar daerah dianggarkan sebesar Rp.7.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.050.000,00 atau sebesar 42%.

Hal tersebut dikarenakan pemakaian Bahan Bakar / Minyak (BBM) dan perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan;

c.g. Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp.790.208.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 757.841.093,00 atau sebesar 96% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dianggarkan sebesar Rp.7.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.000.013,00 atau sebesar 14%.
2. Belanja cetak dianggarkan sebesar Rp.5.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.723.100,00 atau sebesar 33%.
3. Belanja penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 1.034.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 183.600,00 atau sebesar 18%.
4. Belanja perjalanan dinas luar daerah dianggarkan sebesar Rp.16.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.050.000,00 atau sebesar 63%.

Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan;

c.h. Kegiatan Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar teralisasi sebesar Rp. 131.800.338,00 atau sebesar 22% dari nilai anggaran sebesar Rp. 603.850.000,00 pada Belanja perjalanan dinas luar daerah dianggarkan sebesar Rp.450.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 128.050.338,00 atau sebesar 28%. Hal ini disebabkan karena acara Lemhanas yang diikuti oleh Bupati dilaksanakan secara daring/online dari tempat kedudukan;

c.i. Kegiatan Fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah teralisasi sebesar Rp. 1.258.741.973,00 atau sebesar 92% dari nilai anggaran sebesar Rp. 1.374.850.000,00 pada Belanja perjalanan dinas dalam daerah dianggarkan sebesar Rp. 19.325.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.300.000,00 atau sebesar 22%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat kondisional dan tergantung permintaan Bupati;

c.j. Kegiatan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah teralisasi sebesar Rp. 8.055.458,00 atau sebesar 25% dari nilai anggaran sebesar Rp. 31.750.000,00 pada Belanja jasa pemeriksaan laboratorium dianggarkan, Hal ini disebabkan karena pelaksanaan belanja tersebut bersifat kondisional;

c.k. Kegiatan Penataan Kelembagaan serta Penyusunan Analisis dan Formasi Jabatan dianggarkan sebesar Rp. 201.244.450,00 dan terealisasi sebesar Rp. 182.164.791,00 atau sebesar 91% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.950.000,00 atau sebesar 69%.
2. Belanja makanan dan minuman kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 32.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.400.000,00 atau sebesar 60%.

Hal ini disebabkan karena pada kegiatan ini terutama pada belanja makanan dan minuman karena adanya pandemic Covid 19 sehingga kegiatan tidak dilaksanakan secara maksimal;

- c.l. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik terealisasi Rp. 124.746.206,00 atau sebesar 97% dari anggaran sebesar Rp. 128.951.880,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya dianggarkan sebesar Rp. 619.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.279.000,00 atau sebesar 45%.
2. Belanja Dokumentasi dianggarkan sebesar Rp. 450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.300.000,00 atau sebesar 67%.

Realisasi serapan anggaran tersebut tidak maksimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;

- c.m. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 162.413.325,00 dan terealisasi sebesar Rp.155.444.034,00 atau sebesar 96%. Pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas hanya terserap 20% dikarenakan kegiatan dilaksanakan dilingkungan Sekretariat Daerah dan dalam daerah Kecamatan Sampang sehingga tidak memerlukan bahan bakar minyak/gas yang banyak;

- c.n. Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Cukai terealisasi sebesar Rp.15.464.410,00 atau sebesar 60% dari nilai anggarannya sebesar Rp.25.637.925,00. Realisasi kegiatan tersebut tidak maksimal dikarenakan waktu pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan dan disesuaikan dengan kebutuhan;

- c.o. Kegiatan Fasilitasi Keprotokoleran, Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Kegiatan Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan merupakan rangkaian kegiatan pada Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan terealisasi sebesar 98% atau sebesar Rp. 701.715.666,00 dari nilai anggaran sebesar

Rp. 712.529.000,00. Total anggaran hampir terserap semua karena sesuai dengan pelaksanaan dan rencana kebutuhan ;

c.p. Kegiatan Fasilitasi Program Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan sebesar 92% atau sebesar Rp. 1.857.586.400,00 dari nilai anggaran sebesar Rp. 2.010.421.710,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 3.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.800.000,00 atau sebesar 55%.
2. Belanja alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp. 7.230.460,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.639.100,00 atau sebesar 64%.
3. Belanja Dokumentasi dianggarkan sebesarRp. 3.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.650.000,00 atau sebesar 50 %.
4. Belanja cetak dianggarkan sebesar Rp. 9.835.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.660.000,00 atau sebesar 27%.
5. Belanja Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 2.731.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.785.800,00 atau sebesar 29%.

Realisasi tersebut karena pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan;

c.q. Kegiatan Fasilitasi Program Bidang Ketenagakerjaan dan Kependudukan terealisasi sebesar 83% atau sebesar Rp. 39.443.800,00 dari nilai anggaran sebesar Rp. 47.402.265,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp. 2.604.845,00 dan terealisasi sebesar Rp.483.000,00 atau sebesar 19%.
2. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dianggarkan sebesar Rp. 450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.92.000,00 atau sebesar 20%.
3. Belanja Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.138.800,00 atau sebesar 46%.
4. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.185.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 225.000,00 atau sebesar 19%.

Realisasi tersebut tidak terserap semua karena pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan;

c.r. Kegiatan Fasilitasi Program Bidang Sosial dan Kesehatan terealisasi sebesar 39% atau sebesar Rp. 162.152.800,00 dari nilai anggaran sebesar Rp. 411.421.480,00. Kegiatan ini tidak terserap secara maksimal dikarenakan

ada pemangkasan anggaran pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan.

SILPA tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 34.062.038.047,25,00 dan terealisasi sebesar Rp.31.549.978.004,00 atau sebesar 92,63%.

**B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Hambatan dan Kendala dalam penyerapan realisasi belanja dari anggaran yang telah ditetapkan, disebabkan beberapa hal antara lain :

- a. Adanya perubahan sistem dalam hal penatausahaan keuangan yang belum sepenuhnya dipahami oleh satuan kerja perangkat daerah.
- b. Kekurang cermatan dalam perencanaan dan penganggaran.
- c. Adanya fluktuasi harga yang tidak bisa diperkirakan.

**C. TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**

1. Bagian Perekonomian dan SDA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Perekonomian dan SDA Tahun Anggaran 2019 Program Fasilitas Peningkatan Ekonomi Daerah untuk indikator Kontribusi BUMD terhadap PAD berhasil memberikan kontribusi sebesar 3,69% dengan target kontribusi sebesar 3,81% atau dengan kata lain capaian indikator output ini sebesar 96,85% dari target yang direncanakan. Rincian capaian indikator Kontribusi BUMD PAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 diperoleh dari nilai PAD BUMD (hasil kekayaan daerah yang dipisahkan) sebesar Rp. 6.236.679.300,72 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah tujuh puluh dua sen) sedangkan total PAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 168.778.008.507,65 (seratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah enam puluh lima sen). Secara kuantitatif realisasi nilai PAD BUMD (hasil kekayaan yang dipisahkan) tersebut sudah melebihi target nilai PAD BUMD (hasil kekayaan yang dipisahkan) untuk tahun anggaran 2019, yakni Rp. 6.206.365.750,35 (enam milyar dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah tiga puluh lima sen). Namun karena realisasi PAD Kabupaten Sampang nilainya diatas nilai target PAD kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 yakni Rp. 162.994.854.462,35 (seratus enam puluh dua milyar sembilan ratus sembilan empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen).

Sehingga nilai akhir perhitungan persentase kontribusi BUMD terhadap PAD lebih kecil dibandingkan target perhitungan persentase kontribusi BUMD terhadap PAD untuk Tahun Anggaran 2019. Sehingga untuk tahun berikutnya perlu dilakukan Penentuan Target PAD Kabupaten Sampang untuk Tahun Anggaran berikutnya harus ditingkatkan. Sehingga mampu memacu BUMD Kabupaten Sampang untuk lebih meningkatkan kinerja di Tahun Anggaran berikutnya.

## 2. Bagian Organisasi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari 2 Program yaitu :

a. Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase target kinerja kelembagaan, kinerja dan reformasi birokrasi serta ketatalaksanaan, analisis dan formasi Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian realisasi 100 % sesuai dengan target 100 %. Adapun hasil evaluasi dari kegiatan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada kegiatan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagian organisasi berfungsi memfasilitasi, melakukan pembinaan dan menyusun dokumen laporan kinerja akuntabilitas Pemerintah Daerah dan melakukan pendampingan atas penyusunan laporan kinerja akuntabilitas Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan a. Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu dan b. Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu dengan target capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi capaian kinerja kegiatan 100% dan b. Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan target capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi capaian kinerja kegiatan 100%
- Pada kegiatan Penataan Kelembagaan serta penyusunan Analisis dan Formasi Jabatan, bagian organisasi berfungsi memfasilitasi, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kelembagaan, pendampingan penyusunan dokumen Analisis jabatan , analisis beban kerja dan kelas jabatan serta peta jabatan Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan a. Persentase Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan dengan target 100% dan realisasi capaian kinerja kegiatan dengan target 100%, b. Persentase Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan dengan target 100%

dan realisasi capaian kinerja kegiatan dengan target 100%, c. Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS sesuai SOTK baru dengan target 100% dan realisasi capaian kinerja kegiatan dengan target 0% karena mulai tahun 2020 standar kompetensi jabatan ditetapkan oleh Kemenpan RB dan d. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi capaian kinerja kegiatan 100%

- Pada kegiatan Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintah, bagian organisasi berfungsi memfasilitasi, melakukan pembinaan dan menyusun Peraturan Bupati tentang kode wilayah, pakaian dinas dan tata naskah dinas dengan indikator kegiatan a. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Kode Wilayah dengan baik dan benar dengan target capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi capaian kinerja kegiatan 100%, b. Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Tata NaskahDinas dengan baik dan benar dengan target capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi capaian kinerja kegiatan 100% dan c. Persentase PNS yang telah memakai Pakaian Dinas dan Atribut dengan baik dan benar dengan target capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi capaian kinerja kegiatan 100%
- Pada kegiatan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, bagian organisasi berfungsi memfasilitasi, melakukan pembinaan dan menyusun dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2024 dan Rencana Aksi Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 dengan indikator kegiatan a. Jumlah Peraturan Bupati tentang RMRB Kabupaten Sampang target capaian kinerja kegiatan 1 Perbup dan realisasi capaian kinerja kegiatan 1 Perbup, b. Persentase OPD yang telah menyusun Rencana Aksi (Action Plan)Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah target capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi capaian kinerja kegiatan 100%, c. Persentase OPD yang telah di evaluasi Reformasi Birograsi target capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi capaian kinerja kegiatan 100%, d. OPD yang mengikuti Kompetisi Budaya Kinerja Tk. Provinsi JawaTimur target capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi capaian kinerja kegiatan 0%, kegiatan ini sdh direvisi indikatornya pada triwulan ke2 dikarenakan kompetisi budaya kerja sudah tidak ada lagi dan e. Jumlah Unit Kerja yang diusulkan

WBK/WBBM menuju ZonaIntegritas dengan target capaian kinerja kegiatan 2 OPD (Dispendukcapil dan DPMPTSP) dan realisasi capaian kinerja kegiatan 1 OPD (Disoendukcapil) dikarenakan pandemi covid 19

- b. Program Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase dokumen IKM Kabupaten Sampang yang disusun dengan capaian realisasi 100 % sesuai dengan target 100 % dan hanya terdiri dari 1 (satu) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dengan indikator a. Persentase Laporan Standar Pelayanan Publik yang benar dan tepat dengan target capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi capaian kinerja kegiatan kegiatan 100% waktu b. Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercapai target capaian kinerja kegiatan 70% dan realisasi capaian kinerja kegiatan kegiatan 70% dan c. Jumlah PD yang di Monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik target capaian kinerja kegiatan 64 unit kerja dan realisasi capaian kinerja kegiatan kegiatan 0 karena pandemi covid 19

### 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2020 Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk indikator Persentase fasilitasi keprotokoleran dan komunikasi pimpinan dengan capaian realisasi 98.52 % dari target 100 %. Adapun hasil evaluasi dari kegiatan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut: Pada sub kegiatan fasilitasi keprotokoleran; (a) banyak perjalanan dinas luar daerah namun anggaran terbatas. Kemudian, perjalanan dalam daerah yang harus terlaksana tetapi tidak bisa terbayar karena anggaran sudah habis, (b) Perlu adanya dukungan seragam untuk meningkatkan performance dalam mendampingi pejabat/pimpinan, (c) Perlu adanya pelatihan keprotokolan di masing-masing OPD untuk membantu dan memudahkan persiapan awal di lapangan/lokasi kegiatan, (d) Perlunya tambahan repeater untuk koneksi HT agar bisa menjangkau seluruh wilayah kecamatan se Kab Sampang. Kemudian pada sub bagian kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan; (a) memfasilitasi kunjungan kerja tamu pejabat negara dari luar sedangkan kegiatan pisah sambut forkopimda juga dibebankan pada kegiatan ini sehingga perlu ada penambahan anggaran ; (b) Perlu adanya anggaran di satu OPD / DPA untuk giat Vidcon, seringkali prokopim dibenturkan untuk kesiapan konsumsi, back drop dsb. Karena Prokopim sampai saat ini hanya memfasilitasi undangan saja. Dan pada sub kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan; (a) Perlu dianggarkan kalender dengan jumlah 2500 kalender dinding dan 500 kalender



duduk, (b) Untuk mendukung dokumentasi pimpinan perlu Tele dan Blitz (kamera Sony), (c) Perlengkapan Studio Foto. (Bagian Prokopim, Setdakab Sampang)

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Tahun 2019-2024				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Sakip			B	80,01/A	82/A	84/A	64,23/B	66,13/B	70,01/BB	72,01/BB	
a.	Nilai EKPPD			3,5	3,1	3,21	3,22	2,83		3,21	3,22	
b.	Persentase kebijakan daerah yang diimplementasikan ; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum			N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	
c.	Nilai Sakip											
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			82	81,05	81,55	81,75	80,40	81,43	81,55	81,75	
a	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			82	81,05	81,55	81,75	80,40	81,43	81,55	81,75	
3	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif			11,11	20,0	26,19	28,30	11,11	20	26,19	28,30	
a	Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi pemkab		100%	100%				100%				
5	Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan Pemkab		100%	100%				100%				
6	Persentase penataan otonomi		100%	100%				100%				

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Tahun 2019-2024				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	daerah yang diadministrasikan											
7	Persentase Kecamatan yang dilaksanakan Pembinaan		100%	100%				100%				
8	Laporan Penyelesaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berkualitas		16 Februari	16 Februari				16 Februari				
9	Persentase PD yang menyusun Anforjab		100%	100%				100%				
10	Persentase Peraturan Bupati yang diundangkan tepat waktu		100%	100%				100%				
11	Persentase Keputusan Bupati yang diundangkan tepat waktu		100%	100%				100%				
12	Persentase Perda yang diundangkan tepat waktu		100%	100%				100%				
13	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi publik		100%	100%				100%				
14	Persentase Kasus Hukum yang difasilitasi		100%	100%				100%				
15	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan tepat waktu		100%	100%				100%				
16	Persentase paket pengadaan b/j yang dilaksanakan secara e-Tendering		100%	100%				100%				
17	Persentase koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang difasilitasi		100%	5				5				
18	Persentase Kegiatan Pemerintah yang dipublikasikan		100%	4				4				
19	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu		100%	100%				100%				

Jika dilihat tabel di atas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang mendapatkan nilai 66,13 atau predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Sampang menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

*Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022*

**Tabel 3.2.6 Hasil Capaian Nilai SAKIP Tahun 2019 dan 2020**

Komponen yang dinilai		2019		2020	
		Bobot	Bobot	Bobot	Bobot
<b>A</b>	30	30	23,14	30	23,59
<b>B</b>	25	25	16,79	25	17,14
<b>C</b>	15	15	9,98	15	10,23
<b>D</b>	10	10	5,83	10	5,90
<b>E</b>	20	20	9,24	20	9,28
<b>Nilai hasil evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>64,99</b>	<b>100</b>	<b>66,13</b>
<b>Tingkat akuntabilitas kinerja</b>			<b>B</b>		<b>B</b>

**Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 :**

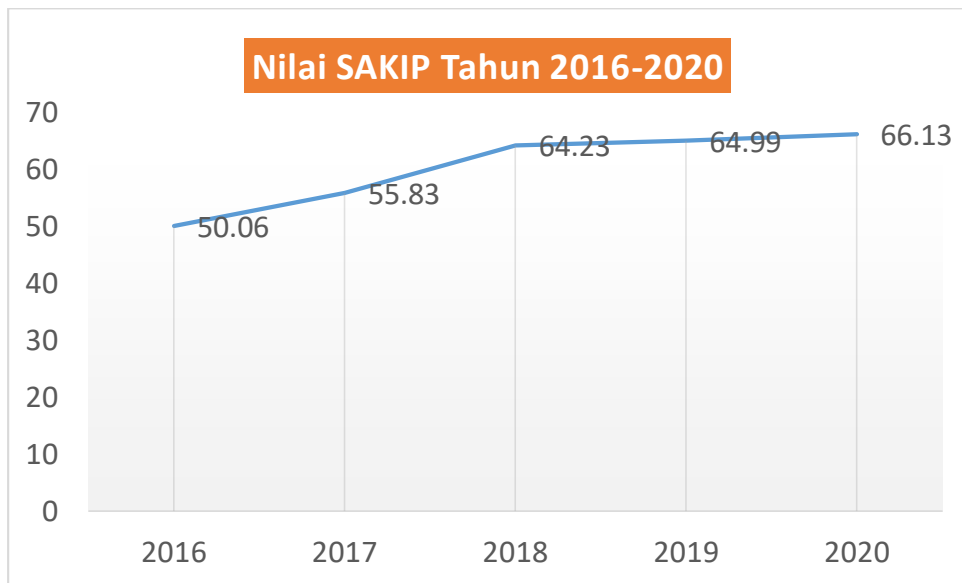
1. Pemerintah Kabupaten Sampang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Secara umum implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang sudah baik, namun substansi belum sepenuhnya mengalami peningkatan yang signifikan;
2. Secara umum perumusan Sasaran Strategis pada RPJMD 2019-2024 yang dijadikan sebagai acuan kinerja pemerintah daerah sudah baik, namun belum sepenuhnya dikawal oleh perangkat daerah pengampu kinerja. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat dan menyelesaikan isu strategis daerah;
3. Mekanisme cascade kinerja yang telah ditetapkan tidak selalu menggambarkan proses bisnis dalam mencapai kinerja, belum sepenuhnya dapat membagi kinerja sesuai peran masing-masing jabatan serta menggambarkan program lintas sektor untuk menjawab isu strategis daerah. Beberapa indikator kinerja perangkat daerah yang ditetapkan belum sepenuhnya sesuai dengan level jabatan dan dapat mengawal kinerja pemerintah daerah;

4. Pemerintah Kabupaten Sampang telah mulai berupaya membangun teknologi informasi yang terintegrasi sebagai upaya untuk menerapkan manajemen kinerja organisasi, namun belum mengakomodir manajemen kinerja individu sebagai upaya komprehensif untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu;
5. Perangkat daerah telah menyusun laporan kinerja tahunan, namun data kinerja yang dilaporkan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja yang berdampak pada pemberian *reward and punishment* perangkat daerah agar memicu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan;
6. Evaluasi internal atas implementasi SAKIP oleh Inspektorat terhadap perangkat daerah telah mulai dilakukan, namun belum secara efektif memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan;
7. Belum optimalnya kualitas implementasi SAKIP mengakibatkan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan belum mendukung pencapaian kinerja.

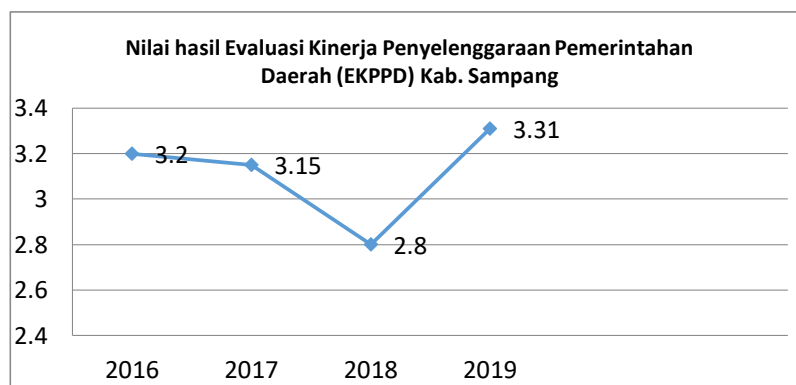
**Rekomendasi perbaikan SAKIP Tahun 2021 :**

1. Mereviu kembali dokumen perencanaan khususnya pada perangkat daerah serta melakukan perbaikan atas perumusan indikator kinerja agar lebih dapat menggambarkan kinerja (outcome) yang diharapkan, sesuai dengan level jabatannya dan memenuhi kriteria SMART. Merumuskan hasil reviu tersebut dalam dokumen perencanaan periode selanjutnya;
2. Melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan. Mempertimbangkan untuk merumuskan program prioritas daerah untuk menyelaraskan isu strategis daerah dengan mengoptimalkan kolaborasi antar perangkat daerah;
3. Mereviu kembali peta proses bisnis yang telah disusun dengan membangun struktur kinerja yang sesuai untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hal ini untuk memastikan kerangka logis pencapaian kinerja telah dijabarkan dengan baik dan setiap pengampu kinerja mendapatkan kinerja yang sesuai;
4. Mendorong pelaksanaan reviu kinerja secara berjenjang baik pada tingkatan organisasi maupun individu melalui aplikasi kinerja yang telah dibangun agar tercipta budaya kinerja yang solid pada setiap level serta mereviu indikator kinerja individu yang dibangun;

5. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi, penilaian kinerja periodik, mekanisme *reward and punishment* serta hal lain yang diperlukan;
6. Meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah pengampu akuntabilitas kinerja sehingga pelaksanaan akuntabilitas kinerja lebih cepat dan terarah;
7. Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di pemerintah daerah.



2. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di tingkat Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang mendapatkan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 3,3114 atau dengan kategori prestasi tinggi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD Tahun 2018. Untuk nilai EKPPD Tahun 2019 yang seharusnya ada di Tahun 2020, hingga saat ini belum ada data nilai. Sedangkan perkembangan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperoleh Kabupaten Sampang selama periode sebelumnya adalah sebagaimana tersaji dalam grafik berikut



3. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, bidang Kesra, bidang Hukum, bidang Barjas, bidang Pembangunan bidang Organisasi, bidang Humas dan bidang Umum sesuai dengan tugas dalam menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2020 mencapai target dengan realisasi 100%
4. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Pada tahun 2020, berdasarkan hasil survey pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 81,43. Hasil ini merupakan hasil yang didapatkan dari hasil Total Jumlah Nilai IKM SKPD Kabupaten Sampang dibagi dengan Jumlah SKPD Kabupaten Sampang

Didapat :  $\frac{\text{Jumlah Nilai Total IKM SKPD Kab Sampang}}{\text{Jumlah Total SKPD Kab Sampang yang di IKM}} = \frac{4.071}{50} = 81,43$

Sedangkan perkembangan nilai hasil survey kepuasan masyarakat Kabupaten Sampang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagaimana tersaji dalam gambar III.1



Gambar III.1 Perkembangan hasil survey kepuasan masyarakat Kabupaten Sampang tahun 2015-2019

5. Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan Bidang Perekonomian sesuai dengan tugas dalam menyelenggarakan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2019 mencapai target dengan realisasi 130% dari 10 kebijakan dengan realisasi mencapai 13 rumusan kebijakan menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
6. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, bidang Kesra, bidang Hukum, bidang Barjas, bidang Pembangunan bidang Organisasi, bidang Humas dan bidang Umum sesuai dengan tugas dalam menyelenggarakan fungsi pengokordinasian penyusunan kebijakan Daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2019 mencapai target dengan realisasi 100%

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang**

Sebagaimana termuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kinerja Kabupaten Sampang masih dalam kategori B
2. Rumusan kebijakan sekretariat daerah belum memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat
3. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik kurang baik dan kejelasan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu isu-isu strategis diatas yang harus ditindaklanjuti pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang 1 (satu) tahun ke depan adalah :

1. setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan peta proses bisnis dan cascading kinerja berdasarkan RPJMD mulai dari eselon II sampai pejabat pelaksana dalam upaya mempengaruhi kualitas pengukuran capaian kinerja dalam upaya mencapai tujuan organisasi/instansi
2. Perlunya Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh sekretariat daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif
3. Perbaikan Prosedur pelayanan publik/SOP seperti revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik serta peningkatan profesionalisme pejabat pelayan publik.

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang sebagai pengampu urusan bidang Pendukung urusan Pemerintahan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati Sampang No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Dan Staf Ahli Bupati Sampang Kabupaten Sampang. Dalam menyelenggarakan tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dapat diukur dari :

- a. Adanya peningkatan predikat SAKIP khususnya dilingkungan Sekretariat Daerah ;
- b. Adanya peningkatan perbaikan Rumusan kebijakan melalui koordinasi antar bagian dilingkungan Sekretariat Daerah ;
- c. Adanya peningkatan Indeks Kualitas Pelayanan publik khususnya dilingkungan Sekretariat Daerah.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang antara lain:

- a. Upaya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan masih sebatas pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran dan masih terdapat kecenderungan belum adanya review atas keberadaan kegiatan yang ada untuk menjawab permasalahan dan isu strategis terkini.
- b. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat.



- c. Prosedur pelayanan publik terlalu kaku, berbelit-belit, biaya dan waktu tidak jelas, tidak ada SOP/tidak dijalankan, dan ada persyaratan yang tidak menyambung/rasional

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang antara lain :

- a. Jumlah kualitas sumber daya manusia (SDM) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang masih kurang mengakibatkan adanya program kerja yang belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- b. Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan pelayanan;
- c. Pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi belum optimal.

### **2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)**

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah **“Sampang Hebat Bermartabat”**.

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, disusunlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.

Keterkaitan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan Misi Kepala daerah adalah pada **misi 4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**

#### **2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang menghadapi tantangan sebagai berikut :

- a. Semakin menguatnya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah dan tuntutan aparatur sipil negara yang profesional;
- b. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
- c. Masih adanya ketidakselarasan kebijakan antar lembaga di pemerintah pusat dan kebijakan yang berubah-ubah;

Sedangkan peluang yang ada antara lain :

- a. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang secara ideal;
- b. Adanya dukungan dan peran serta para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- c. Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan pelayanan; dan
- d. Perkembangan teknologi dan informasi.

#### **2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan reward and punishment
- b. Pengumpulan data kinerja harus dilakukan secara berkala dan tampak dalam laporan pengukuran kinerja;
- c. Pengukuran kinerja dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi;
- d. IKU harus dimanfaatkan untuk dokumen perencanaan dan penganggaran;
- e. Hasil pengukuran kinerja harus memberikan dampak terhadap perolehan reward and punishment;
- f. IKU harus dilakukan reuiu untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kepentingan

organisasi;

g. Laporan kinerja perlu disempurnakan dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dalam dokumen serta informasi kinerja dibuat secara rinci dan detail sehingga andal

h. Informasi kinerja harus dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan, program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja;

i. Melakukan rencana aksi untuk mengendalikan kinerja

j. Melakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan;

k. Informasi kinerja harus dapat digunakan seluruhnya dalam perbaikan perencanaan; dan

l. Meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2022s dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Sampang**

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.	<b>PEMERINTAHAN</b>				51,236,571,159	<b>PEMERINTAHAN</b>				
4.05.4.05.03.0 1.	<b>Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>		<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran</b>	100%	6.230.010.260	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg difasilitasi</b>	100%	24,431,729,138
4.01.4.01.01.0 1.01.	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Sekretariat Daerah	a. Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun	10.000 Surat	3.402.864.665	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>			100%	24,333,679
			b. Jumlah jaminan atas barang milik daerah	3 jenis	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	4,280,840
			c. Cakupan pemenuhan kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi	12 bulan	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	5,294,456
			d. Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1536 eksemplar	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	4,866,364
			e. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan	94 unit	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	5,216,609
			f. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	22 jenis	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	4,675,410
			g. Jumlah Tenaga Honor Daerah	7 orang	-	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			100%	14,646,101,572
4.05.4.05.03.0 1.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	a. Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	74 jenis	1.393.845.595	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Daerah	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	149 Orang	14,487,404,753
			b. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	90 jenis		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat Daerah	Jumlah ATK	Jumlah ATK	141,763,337
			c. Jumlah bahan logistik dan juru masak berikut pramusaji untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang	12 bulan		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	71 jenis 250 Dokumen	8.058.897

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			d. Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dan layak pakai	9 jenis		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan tahunan	1 dokumen	3,780,099
			e. Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	3 Rumah Dinas		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	1 dokumen	5,094,486
			f. Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	38 jenis		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>227,965,818</b>
4.05.4.05.03.0 1.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	a. Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti untuk menyamakan persepsi antar daerah	1391 kali	1.433.300.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sekretariat Daerah	Jumlah Jaminan atas barang milik daerah	3 jenis	227,965,818
			b. Jumlah koordinasi dengan SKPD di Kabupaten Sampang	403 kali	-	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>146,645,391</b>
<b>4.05.4.05.03.0 2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>9.405.114.680</b>	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat Daerah	Jumlah Pakaian ASN yang disediakan	27 stel	48,037,391
4.01.4.01.01.0 2.01.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	Sekretariat Daerah	a. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan gedung kantor	1 gedung kantor	833.801.435	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	98,608,000
			b. Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 gedung kantor		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>3,261,715,482</b>
4.05.4.05.03.0 2.02.	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati	a. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas	3 Rumah Dinas	1.211.969.920	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	20 Jenis	169,152,119
			b. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan untuk Rumah	3 Rumah Dinas		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor untuk produktivitas kerja PNS	88 buah	217,248,374

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang							
4.05.4.05.03.0 2.03.	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Sekretariat Daerah	a. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Bupati (5 unit); Wakil Bupati (2 unit); Sekretaris Daerah (2 unit); Asisten (3 unit); Staf Ahli (3 unit); Kepala Bagian (9 unit); Tangki Air (1 unit); Pick Up (2 unit); Pool (5 unit)	32 Unit	6.583.385.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat Daerah	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	24 Jenis	119,834,425
			b. Jumlah pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati	2 Unit		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1116 exemplar	92,160,000
			c. Jumlah pengadaan kendaraan dinas untuk Forkopimda	4 Unit		Fasilitas Kunjungan Tamu	Sekretariat Daerah	Jumlah makan dan minum untuk tamu yang disediakan	22 Jenis	752,558,564
4.05.4.05.03.0 2.04.	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	a. Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	36 unit	652.958.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	412 Kali	1,910,762,000
			b. Jumlah pengadaan alat rumah tangga, computer dan meja/kursi kerja pejabat	44 unit				Jumlah Koordinasi dan konsultasi luar Daerah	888 Kali	
4.05.4.05.03.0 2.07.	Pengadaan Pakaian Dinas		a. Jumlah pembuatan Pakaian Dinas KDH/WKDH untuk Bupati dan Wakil Bupati, PDH untuk Sekda dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati	50 orang	122.999.825	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>575,006,216</b>
			b. Jumlah pakaian kerja lapangan untuk Kasubag. RT beserta staf dan petugas kebersihan rumah dinas	50 orang		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah pengadaan kendaraan Roda 4	1 unit	456,164,634

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.4.05.03.0 3.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>251.122.000</b>	Pengadaan Mebel	Sekretariat Daerah	jumlah kebutuhan mebel yang diadakan	<b>57 unit</b>	68,855,000
4.05.4.05.03.0 3.01.	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Luar Daerah	Jumlah PNS yang wajib meningkatkan keterampilan teknis di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Sampang berikut kewajiban Bupati mengikuti Lemhanas	11 orang	410.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat Daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	61 unit	49,986,582
4.05.4.05.03.0 4.	<b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik</b>		<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>45.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100%</b>	1,764,565,623
4.05.4.05.03.0 4.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Sekretariat Daerah	a. Jumlah Laporan Kemajuan fisik /Non fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LkjIP	6 Dok	8.536.825	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Daerah	Jumlah surat masuk dan terkirim	6600 Surat	39,362,767
			a. Jumlah Laporan Akhir Tahun sebelumnya SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	6 Dok		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat Daerah	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rekening	897,142,856
4.05.4.05.03.0 4.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan RKA dan DPA SKPD Tahun berikutnya	4 Dok	16.028.675	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat Daerah	Cakupan pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	828,060,000
4.05.4.05.03.0 4.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Sekretariat Daerah	Jumlah promosi pelayanan perangkat daerah	2 paket	15.700.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>2,192,061,320</b>
4.05.4.05.03.15	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>		<b>Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>2.099.995.000</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan dan surat-surat perizinan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati	9 unit	428,345,400

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.4.05.03.15 .01.	Fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	a.Jumlah kunjungan kerja / inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	369 kali	2.068.245.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan memperoleh jasa perizinan	24 unit	390,630,000
			b.Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	409 kali		Pemeliharaan Mebel	Sekretariat Daerah	Jumlah mebel yang dipelihara	160 unit	32,000,000
4.05.4.05.03.15 .02.	Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Keluarga Bupati dan Wakil Bupati	4 keluarga	31.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat Daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	210 Unit	116,410,000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat Daerah	Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yang direhabilitasi dan dipelihara	4 gedung	1,224,675,920
						<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>880,095,937</b>
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati	2 orang	168,207,952
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati	2 orang	80,137,985
						Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Medical ceck up Bupati dan Wakil Bupati	2 Keluarga	31,750,000
						Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Dana Penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati	2 orang	600,000,000
						<b>Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>713,238,100</b>



Kode	RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan	12 Bulan	478,395,000
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Cakupan Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 Bulan	190,390,000
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah tangga di Sekretariat Daerah yang disediakan	12 Bulan	44,453,100
						<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	<b>100%</b>	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	14 Kecamatan	500,000,000
<b>4.05.4.05.03.16</b>	<b>Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah</b>	<b>100%</b>	<b>999.550.000</b>	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan yang terlayani</b>	<b>100%</b>	<b>1.839.612.024</b>
4.05.4.05.03.16.01	Fasilitasi administrsai pemerintahan	Sekretariat Daerah	jumlah dialog/audiensi yang dilaksanakan	14 kali	170.000.000	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan yang terlayani</b>	<b>100%</b>	<b>1.839.612.024</b>
4.05.4.05.03.16.02	Fasilitasi administrasi kewilayahan	Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen rupabumi/toponomi	1 dok dan peta	320.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Disusun LPPD, ILPPD, LKPJ dan SPM	4 Dokumen	350,001,133
4.05.4.05.03.16.03	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim otoda	Sekretariat Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim otoda	24 dok	150.000.000			Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pembinaan Administrasi	14 Kecamatan	
4.05.4.05.03.16.04	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sekretariat Daerah	jumlah dokumen penyusunan lppd dab ilppd yang disusun	2 dok	229.550.000			Jumlah Rapat Koordinasi FORKKOPIMDA yang dilaksanakan	24 Kali	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.4.05.03.16.05	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi	14 kec	130.000.000			Jumlah Rapat Koordinasi OPD Yang Dilaksanakan	6 Kali	
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Batas Desa Yang Di Administrasikan	100 Patok	442,172,689
								Jumlah Desa/ Kelurahan yang di Administrasikan	1 Desa/ Kelurahan	
						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah PAW yang dilaksanakan	3 Kali	1,047,438,202
								Jumlah Rapat Koordinasi Tim Otoda	6 Kali	
								Jumlah Rapat Koordinasi TP2D yang dilaksanakan	36 Kali	
4.05.4.05.03.17	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		a. Persentase Produk Hukum yang diundangkan b. Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Perdata Pemerintah Daerah yang ditangani	100% 100%	1.012.165.740	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan yang terlayani	100%	1,839,612,024
4.05.4.05.03.17.01	Penyusunan Produk Hukum	Sekretariat Daerah	a. Jumlah Perda yang diundangkan	7 perda	430.401.275	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	
			b. Jumlah Perbup yang diundangkan	50 Perbup		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Daerah	24 Kali	113,708,682
			a. Jumlah Raperda	5 Raperda		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Cakupan pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi produk Hukum yang diundangkan	100%	
			b. Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan	500 SK				Cakupan pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi kasus hukum perdata pemerintah daerah yang ditangani	100%	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			C. Jumlah Naskah Akademik	5 Naskah akademik		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Kepbup Yang Ditetapkan	550 KepBup	295,558,414
4.05.4.05.03.17.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	a. Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	350 orang	363.320.015			Jumlah Naskah Akademik	5 NA	
			b. Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani	4 Kasus				Jumlah Perbup Yang Diundangkan	50 Perbup	
			c. Jumlah Kadarkum yang dibina	225 Keluarga				Jumlah Perda Yang Diundangkan	12 Perda	
4.05.4.05.03.17.03	Fasilitasi Dokumentasi dan Informasi	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan berupa buku Bulletin dan Buku Lembaran Daerah, Jumlah peserta sosialisasi	360 buku dan 350 org	218.444.450			Jumlah Raperda	5 Raperda	
						Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Kadarkum Yang Dibina	9 Desa	230,000,000
								Jumlah Kasus Hukum Yang Ditangani	4 Kasus	
								Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	7 Kecamatan	
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Buku Bulletin Edisi Juni dan Desember	240 Buku	128,200,000
								Jumlah Buku Lembaran Daerah	120 Buku	
								Jumlah Peserta Sosialisasi	7 Kecamatan	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.4.05.03.18	Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Persentase target kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan	100%	1.055.212.375	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	619,604,300
4.05.4.05.03.18.01	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Sekretariat Daerah	a.Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu	100%	309.999.825	Penataan Organisasi		Persentase penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	619,604,300
			b.Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	100%		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah OPD yang menyusun Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan	39 OPD	132,065,000
4.05.4.05.03.18.02	Penataan Kelembagaan serta Penyusunan Analisis dan Formasi Jabatan	Sekretariat Daerah	a. Persentase Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan	100%	312.975.350			Jumlah OPD yang menyusun Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan	39 OPD	
			b.Persentase Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan	100%				Jumlah OPD yang Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	39 OPD	
			c.Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS sesuai SOTK baru	100%		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	Jumlah OPD mengikuti Lomba Inovasi Pelayanan Publik	2 OPD/unit kerja	127,615,300
			d.Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	100%				Jumlah OPD menyusun SKM	39 OPD	
4.05.4.05.03.18.03	Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintah	Sekretariat Daerah	a. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Kode Wilayah dengan baik dan benar	100%	142.254.030			Jumlah OPD/Unit Kerja yang menyusun Standar Pelayanan	53 unit kerja	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			b. Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Tata Naskah Dinas dengan baik dan benar	100%				Jumlah OPD yang melaksanakan tata laksana dengan baik dan benar	39 OPD	
			c. Persentase PNS yang telah memakai Pakaian Dinas dan Atribut dengan baik dan benar	100%				Jumlah OPD yang melaksanakan tata naskah dinas dengan baik dan benar	39 OPD	
4.05.4.05.03.18.04	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	a. Jumlah Peraturan Bupati tentang RMRB Kabupaten Sampang	1 Perbub	289.983.170	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Jumlah OPD yang menyusun dokumen Reformasi Birokrasi	39 OPD	153,132,500
			b. Persentase OPD yang telah menyusun Rencana Aksi (Action Plan) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %				Jumlah Unit Kerja yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2 OPD/unit kerja	
			c. Persentase OPD yang telah di evaluasi Reformasi Birokrasi	100 %		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan OPD yang dievaluasi Pelayanan Publik	39 OPD	60,803,000
			d. OPD yang mengikuti Kompetisi Budaya Kinerja Tk. Provinsi Jawa Timur	2 OPD				Jumlah OPD/Unit Kerja yang dilakukan monev Pelayanan Publik	45 OPD/Unit Kerja	
			e. Jumlah Unit Kerja yang diusulkan WBK/WBBM menuju Zona Integritas	8 Unit Kerja				Jumlah Standar Pelayanan yang dievaluasi	53 OPD/Unit Kerja	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	9 Laporan	145,988,500
								Jumlah Pelaporan Kinerja Kabupaten Tepat Waktu	1 Laporan	
4.05.4.05.03.41	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>		<b>Persentase dokumen IKM Kabupaten Sampang yang disusun</b>	<b>100%</b>	<b>246.608.180</b>					
4.05.4.05.03.41.01	Pembinaan pelayanan publik	Sekretariat Daerah	Persentase Laporan Standar Pelayanan Publik yang benar	100%	246.608.180					

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan tepat waktu							
			Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercapai	70%						
			Jumlah PD yang di Monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik	64 unit kerja						
<b>4.05.4.05.03.19</b>	<b>Program Fasilitas Administrasi Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase fasilitas Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>995.741.664</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>		<b>Persentase kegiatan administrasi pembangunan yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>533,095,643</b>
4.05.4.05.03.19.01	Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah buku pedoman, HSPK dan SSHB yang disusun	3 dok	298.538.199	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>		<b>Persentase kegiatan administrasi pembangunan yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>533,095,643</b>
4.05.4.05.03.19.02	Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi	700 org	276908425	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Sekretariat Daerah	'Jumlah Aplikasi Standart Satuan Harga (SSH) yang disusun	1 Aplikasi	255,902,511
4.05.4.05.03.19.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat Daerah	a. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi yang disusun	1 dok	420.295.040			'Jumlah Pedoman Pelaksanaan Program	1 Dokumen	
			b. Jumlah Kegiatan Konstruksi yang diresmikan secara simbolis	10 lokasi				'Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	200 Peserta	
						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah	'Jumlah Buku Pengendalian Program Pembangunan Daerah yang disusun	1 Dokumen	150,288,030
								'Jumlah Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan Daerah yang dilaksanakan 'Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah yang disusun	10 Rapat 1 Dokumen	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	'Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun	1 Dokumen	126,905,102
4.05.4.05.03.20	Program Fasilitas Unit Layanan Pengadaan		Persentase paket pengadaan barang/jasa yang difasilitasi secara elektronik	100%	1.162.140.425	Program Perekonomian dan Pembangunan		Persentase paket pengadaan Barjas yang difasilitasi secara elektronik	100%	897,622,230
4.05.4.05.03.20.01	Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	Dokumen Hasil Tender	300 Dok	555.383.765	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase paket pengadaan Barjas yang difasilitasi secara elektronik	100%	897,622,230
4.05.4.05.03.20.02	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah sosialisasi/ pelatihan /pendampingan terkait Pengadaan Barang/ Jasa	3 kali	233.400.500	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Tender	150 dokumen	486,610,255
4.05.4.05.03.20.04	Pengelolaan LPSE	Sekretariat Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	2 aplikasi	373.356.160	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Sekretariat Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	2 aplikasi	278,092,218
						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek/Pendampingan terkait pengadaan barang dan jasa	3 kali	132,919,757
4.05.4.05.03.21	Program Fasilitas Peningkatan Ekonomi Daerah		a. Jumlah pelaku ekonomi kreatif	100%	232.208.055.5	Program Perekonomian dan Pembangunan		Jumlah Kebijakan SDA yang dipantau	4 Kebijakan	10.696.492.478
			b. Kontribusi BUMD terhadap PAD					Jumlah pelaku ekonomi kreatif	51 pelaku	
4.05.4.05.03.21.01	Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitas, koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan TSP	50 kali	45.323.798			Kontribusi BUMD terhadap PAD	3,70 %	
			Koordinasi dengan SKPD terkait mengenai pengelolaan SDA	12 kali		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemantauan Kebijakan Perekonomian	100%	10.696.492.478

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.4.05.03.21.02	Koordinasi Pelayanan Sarana Perekonomian;	Sekretariat Daerah	a. Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif, agribisnis dan pariwisata	24 kali	101.247.022.5	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan BUMD dan BLUD	83 Kali	45,254,038
			b. Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pameran, agribisnis dan pariwisata	36 kali				Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD	35 Kali	
4.05.4.05.03.21.03	Koordinasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Sekretariat Daerah	a. Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD	33 kali	85.637.235	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi mengenai Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta inflasi daerah	15 kali	881,009,950
c			b. Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan BUMD dan BLUD	80 kali				Jumlah operasi pasar pemberantasan rokok cukai ilegal	20 kali	
			c. Audit Apotek Trunojoyo Sampang	1 paket				Persentase penurunan peredaran rokok ilegal	100 persen	
4.05.4.05.03.24	<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>		<b>Persentase peserta sosialisasi yang memahami ketentuan di bidang cukai</b>	<b>100%</b>	<b>196.754.795</b>	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Sekretariat Daerah	Jumlah koordinasi dengan perangkat daerah terkait mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pameran dan pariwisata	0 kali	35,840,902
4.05.4.05.03.24.01	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan	Sekretariat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai	300 org	196.754.795	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	3 kali	9,708,990,050



Kode	RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	perundangan-undangan di bidang cukai									
								Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang cukai	14 kali	
								Pengumpulan data penerima buruh tani tembakau penerima BLT	12 Kec	
								Pengumpulan informasi peredaran rokok kena cukai ilegal	28 kali	
								Penyaluran BLT untuk Buruh Tani Tembakau	12 Kec	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	5 kali	3,718,997
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait pelaksanaan TSP K3S Migas	20 kali	21,678,541
								Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	10 kali	
4.05.4.05.03.23	<b>Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Persentase fasilitasi program bidang kesejahteraan rakyat</b>	<b>100%</b>	<b>4.445.645.955</b>	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>*Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>11,833,523,042</b>
4.05.4.05.03.23.01	Fasilitasi Program Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan	Sekretariat Daerah	a. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	13 keg	3.793.634.710	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>*Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>11,833,523,042</b>

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			b. Jumlah peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan	13 keg		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah	Jumlah koordinasi bidang pendidikan, kebudayaan dan keagamaan	40 kali	9,204,344,328	
4.05.4.05.03.23.03	Fasilitasi Program Bidang Ketenagakerjaan dan Kependudukan	Sekretariat Daerah	Jumlah Koordinasi Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kependudukan	21 kali	60.752.265			Jumlah Peringatan Hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan	13 keg		
4.05.4.05.03.23.04	Fasilitasi Program Bidang Sosial dan Kesehatan	Sekretariat Daerah	a. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	5 keg	591.258.980	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	5 keg	1,858,706,376	
			b. Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan	5 keg				Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	33 kali		
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Jumlah koordinasi bidang ketenagakerjaan dan kependudukan	1 kali	770,472,338	
4.05.4.05.03.42	<b>Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Persentase fasilitasi keprotokoleran dan komunikasi pimpinan</b>	<b>100%</b>	<b>680.729.000</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Persentase penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan</b>	<b>100%</b>	<b>381,806,896</b>	
.05.4.05.03.42.01	Fasilitasi keprotokoleran	Sekretariat Daerah	Keprotokoleran acara pimpinan	300 keg	362.569.000	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Persentase penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan</b>	<b>100%</b>	<b>381,806,896</b>	
.05.4.05.03.42.02	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Sekretariat Daerah	jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi	12 kunjungan	131.000.000	Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat Daerah	Jumlah keprotokoleran acara	'300 kegiatan	220,131,357	
.05.4.05.03.42.03	Fasilitasi dokumentasi pimpinan	Sekretariat Daerah	Dokumentasi acara pimpinan	200 keg	187.160.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi	12 kunjungan	83,532,648	
						Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sekretariat Daerah	Jumlah Pendokumentasian tugas pimpinan	'300 kegiatan	78,142,891	
<b>TOTAL</b>					<b>51,236,571,159</b>	<b>TOTAL</b>					<b>52.500.952.847</b>

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2022 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 3**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Kabupaten Sampang Tahun 2022**

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Sekretariat Daerah pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2022 dengan Tema “Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”



Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022

Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

## Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sampang Tahun 2022

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sampang
<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah
<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> Peningkatan ketahanan sosial masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar
<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	<b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat
<b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah
<b>Prioritas Pembangunan 6:</b> Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	<b>Prioritas Pembangunan 6:</b> Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
<b>Prioritas Pembangunan 7:</b> Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<b>Prioritas Pembangunan 7:</b> Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan inovasi daerah. <b>dan</b> <b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2022
1	2	3		4
1	<b>Tujuan 1 :</b>			
	<b>Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</b>		<b>Nilai Sakip</b>	72,01/BB
	<b>Sasaran 1 :</b>			
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Nilai EKPPD	3,24
		2	Persentase kebijakan daerah yang diimplementasikan : a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum	100%
	3	Persentase pelaporan kinerja Kabupaten dan OPD yang berkualitas	100%	
2	<b>Tujuan 2 :</b>			
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,47
	<b>Sasaran 2 :</b>			
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75
3	<b>Tujuan 3 :</b>			
	Meningkatkan peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	1	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	28,30
	<b>Sasaran 3 :</b>			
	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif		Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	100%

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan Sekretariat Daerah mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Sekretariat Daerah mendukung pada pencapaian **misi 4** yaitu

**“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”.** Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu Evaluasi kinerja BUMD, Pemberantasan barang kena cukai ilegal, Peningkatan kualitas pelayanan publik dan Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Selain pencapaian visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran daerah juga memperhatikan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang yang telah disusun.

**b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan**

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”.**

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Program Perekonomian dan Pembangunan
- Program merintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 pada sistem aplikasi <https://sampangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah>.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022

Sekretariat Daerah mengampu urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Program-program Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas 2. Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah “** dan **“Prioritas 4. Percepatan Reformasi Birokrasi, Penyederhanaan Regulasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik“** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>52,500,952,847.00</b>
4	1				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>52,500,952,847.00</b>
4	1	2			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			<b>14,940,602,162.00</b>
4	1	2	2.01		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>			<b>1,839,612,024</b>
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Disusun LPPD, ILPPD, LKPJ dan SPM	4 Dokumen	350,001,133
				Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pembinaan Administrasi		14 Kecamatan		
				Jumlah Rapat Koordinasi FORKKOPIMDA yang dilaksanakan		24 Kali		
				Jumlah Rapat Koordinasi OPD Yang Dilaksanakan		6 Kali		
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Batas Desa Yang Di Administrasikan	100 Patok	442,172,689
				Jumlah Desa/ Kelurahan yang di Administrasikan		1 Desa/ Kelurahan		
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah PAW yang dilaksanakan	3 Kali	1,047,438,202
				Jumlah Rapat Koordinasi Tim Otodora		6 Kali		



						Jumlah Rapat Koordinasi TP2D yang dilaksanakan	36 Kali	
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.04</b>			<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>		<b>113,708,682</b>
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Daerah	24 Kali	113,708,682
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.03</b>			<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		<b>653,758,414</b>
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Kepbup Yang Ditetapkan	550 KepBup	295,558,414
						Jumlah Naskah Akademik	5 NA	
						Jumlah Perbup Yang Diundangkan	50 Perbup	
						Jumlah Perda Yang Diundangkan	12 Perda	
						Jumlah Raperda	5 Raperda	
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kadarkum Yang Dibina	9 Desa	230,000,000
						Jumlah Kasus Hukum Yang Ditangani	4 Kasus	
						Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	7 Kecamatan	
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Buku Bulletin Edisi Juni dan Desember	240 Buku	128,200,000
						Buku Lembaran Daerah	120 Buku	
						Jumlah Peserta Sosialisasi	7 Kecamatan	
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>500,000,000</b>
4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	14 kecamatan	500,000,000
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>			<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>11,833,523,042</b>
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah koordinasi bidang pendidikan, kebudayaan dan keagamaan	40 kali	9,204,344,328
						Jumlah Peringatan Hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan	13 keg	
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	5 keg	1,858,706,376
						Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	33 kali	
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah koordinasi bidang ketenagakerjaan dan kependudukan	21 kali	770,472,338
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		<b>12,127,210,351.00</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>			<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>		<b>962,104,890</b>

4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan BUMD dan BLUD	83 kali	45,254,038
						Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD	35 kali	
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi mengenai Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta inflasi daerah	15 kali	881,009,950
						jumlah operasi pasar pemberantasan rokok cukai ilegal	20 kali	
						Persentase penurunan peredaran rokok ilegal	100 persen	
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah koordinasi dengan perangkat daerah terkait mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pameran dan pariwisata	40 kali	35,840,902
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>				<b>9,734,387,588</b>
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	3 kali	9,708,990,050
						Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang cukai	14 kali	
						pengumpulan data penerima buruh tani tembakau penerima BLT	12 Kec	
						Pengumpulan informasi peredaran rokok kena cukai ilegal	28 kali	
						Pnyaluran BLT untuk Buruh Tani Tembakau	12 Kec	
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	5 kali	3,718,997
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait pelaksanaan TSP K3S Migas	20 kali	21,678,541
						Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi	10 kali	

						dan air		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>			<b>533,095,643</b>
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Aplikasi Standart Satuan Harga (SSH) yang disusun	1 aplikasi	255,902,511
						Jumlah Pedoman Pelaksanaan Program	1 dokumen	
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	200 peserta	
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Buku Pengendalian Program Pembangunan Daerah yang disusun	1 dokumen	150,288,030
						Jumlah Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	10 rapat	
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah yang disusun	1 dokumen	
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun	1 dokumen	126,905,102
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>			<b>897,622,230</b>
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Tender	150 Dok	486,610,255
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	2 Aplikasi	278,092,218
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek/ Pendampingan terkait pengadaan barang dan jasa	3 kali	132,919,757
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>25,433,140,334.00</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>24,333,679</b>
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	4,280,840
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	5,294,456

4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	4,866,364
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	5,216,609
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	4,675,410
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>14,646,101,572</b>
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	149 Orang	14,487,404,753
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK	71 Jenis	141,763,337
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	250 Dokumen	8,058,897
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan tahunan	1 Dokumen	3,780,099
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	1 Dokumen	5,094,486
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>227,965,818</b>
4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jaminan atas barang milik daerah	3 Jenis	227,965,818
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>146,645,391</b>
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian ASN yang disediakan	27 Stel	48,037,391
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	98,608,000
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>3,261,715,482</b>

4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	20 Jenis	169,152,119
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor untuk produktivitas kerja PNS	88 buah	217,248,374
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	24 Jenis	119,834,425
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1116 exemplar	92,160,000
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum untuk tamu yang disediakan	22 Jenis	752,558,564
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	606 Kali	1,910,762,000
						Jumlah Koordinasi dan konsultasi luar Daerah	1250 Kali	
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>575,006,216</b>
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan Roda 4	1 Unit	456,164,634
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	jumlah kebutuhan mebel yang diadakan	34 unit	68,855,000
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	44 unit	49,986,582
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,764,565,623</b>
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan terkirim	10000 Surat	39,362,767
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rekening	897,142,856
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	828,060,000
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2,192,061,320</b>

4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan dan surat-surat perizinan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati	9 Unit	428,345,400
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan memperoleh jasa perizinan	24 Unit	390,630,000
4	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	160 Unit	32,000,000
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	362 Unit	116,410,000
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yang direhabilitasi dan dipelihara	362 Unit	1,224,675,920
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.11</b>		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>			<b>880,095,937</b>
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati	2 Orang	168,207,952
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati	2 Orang	80,137,985
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical ceck up Bupati dan Wakil Bupati	2 Keluarga	31,750,000
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati	2 Orang	600,000,000
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.12</b>		<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>			<b>713,238,100</b>

4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan	12 Bulan	478,395,000
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Cakupan Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 Bulan	190,390,000
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah tangga di Sekretariat Daerah yang disediakan	12 Bulan	44,453,100
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.13</b>		<b>Penataan Organisasi</b>			<b>619,604,300</b>
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang menyusun Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan	39 OPD	132,065,000
						Jumlah OPD yang menyusun Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan	39 OPD	
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD mengikuti Lomba Inovasi Pelayanan Publik	2 OPD	127,615,300
						Jumlah OPD menyusun SKM	39 OPD	
						Jumlah OPD/Unit Kerja yang menyusun Standar Pelayanan	53 OPD/Unit Kerja	
						Jumlah OPD yang melaksanakan tata laksana dengan baik dan benar	39 OPD	
						Jumlah OPD yang melaksanakan tata naskah dinas dengan baik dan benar	39 OPD	
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang menyusun dokumen Reformasi Birokrasi	39 OPD	153,132,500
						Jumlah Unit Kerja yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2 OPD/Unit Kerja	
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan OPD yang dievaluasi Pelayanan Publik	39 OPD	60,803,000
						Jumlah OPD/Unit Kerja yang dilakukan monev Pelayanan Publik	45 OPD/Unit Kerja	
						Jumlah Standar Pelayanan yang dievaluasi	53 OPD/Unit Kerja	
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	39 Laporan	145,988,500
						Jumlah Pelaporan Kinerja Kabupaten Tepat Waktu	1 Laporan	
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.14</b>		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>			<b>381,806,896</b>

4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	jumlah keprotokoleran acara pimpinan	300 kegiatan	220,131,357
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi	12 kunjungan	83,532,648
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	jumlah pendokumentasian tugas pimpinan	300 kegiatan	78,142,891
<b>TOTAL</b>								<b>52,500,952,847.00</b>

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah akan melaksanakan Urusan Unsur Fungsi Penunjang Lainnya dengan total anggaran **Rp 52.500.952.847,00** yang digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 3 program, 20 kegiatan dan 64 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Sekretariat Daerah dan lingkup Kabupaten Sampang.

#### 4.2 Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2022

Ada 4 Inovasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 diantaranya adalah:

##### 1. So Religie

Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan ulang organisasi perangkat daerah (perampingan perangkat daerah), yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diharapkan membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah.

Tujuan :

1. Birokrasi lebih dinamis dan lincah
2. Percepatan sistem kerja
3. Mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja agar lebih optimal
4. Mewujudkan profesionalitas ASN
5. Mengefisiensi belanja birokrasi

Manfaat :

Mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi sehingga kinerja Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien dan efektif.



## **2. Peningkatan Kinerja PDAM Trunojoyo Sampang dengan Pembentukan Dewan Pengawas**

PDAM merupakan BUMD Kab Sampang yang memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kab. Sampang. Oleh karena itu guna meningkatkan kinerja PDAM Trunojoyo Sampang, perlu dibentuk Dewan Pengawas PDAM

Tujuan dan Manfaat :

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja Perumda Trunojoyo Sampang yang akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat dibidang perairan.

## **3. Percepatan dan Ketepatan Realisasi Pelaksanaan**

Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam daerah terdampak kegiatan migas yang dilakukan oleh KKKS Migas cluster Sampang. Sehingga KKKS Migas cluster Sampang wajib melaksanakan PPM di Kabupaten Sampang yang sasarannya adalah masyarakat di daerah terdampak migas. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sampang wajib untuk memastikan agar pelaksanaan PPM tersebut bisa bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Sampang. Maka perlu dipastikan jika pelaksanaan PPM tersebut tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan Pemkab Sampang serta terealisasi dengan tepat sasaran melalui :

1. Pembentukan Tim Pengembangan Masyarakat Kabupaten Masyarakat
2. Melaksanakan Jaring Aspirasi Masyarakat di tingkat desa dalam penentuan usulan kegiatan PPM yang akan dilaksanakan
3. Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan hasil jasmag agar tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang telah didanai oleh Pemerintah Kabupaten Sampang
4. Melakukan monitoring hasil pelaksanaan PPM.

Tujuan dan Manfaat :

Mensinergikan pelaksanaan PPM Migas oleh KKKS Migas Cluster Sampang dengan Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sampang

## **4. Pengendalian Inflasi daerah**

Inflasi adalah meningkatnya harga barang dan jasa. Secara umum, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan terjadi terus menerus. Pemerintah Kabupaten Sampang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga

inflasi yang rendah dan stabil, karena dengan inflasi yang rendah dan stabil akan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga daya beli masyarakatpun meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat ikut meningkat

Tujuan dan Manfaat :

Menjaga agar inflasi rendah, stabil dan terkendali

## **BAB V PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi Menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**, **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”** dan **“Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif”**.

Hasil evaluasi atas renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 93,06 % atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Sekretariat Daerah adalah **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**, **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”** dan **“Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif”**, Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien yang didukung oleh sasaran yaitu **“Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah”**, Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh sasaran yang sama dengan tujuan yaitu yang didukung oleh sasaran yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”** dan tujuan Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif didukung oleh sasaran yaitu **“Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif”**.

Berdasarkan hasil telaahan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dan hasil analisa kebutuhan maka pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah akan melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Perencanaan dan Penelitian dengan total anggaran Rp. 52.500.952.847,00 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 1 urusan, 3 program, 20 kegiatan dan 64 sub kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu di Sekretariat Daerah dan lingkup Kabupaten Sampang.

#### **4.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2022, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI